



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGETAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja,

yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan selama Tahun Anggaran 2019;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan pada tahun 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- o. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Kabupaten Magetan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan, maka tugas pokok yang diemban adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya membantu Bupati.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Bupati.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subag. Tata Usaha
 - b) Subag. Rumah Tangga
 - c) Subag. Perlengkapan
- c. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :
 - a) Subag. Rapat
 - b) Subag. Risalah
 - c) Subag. Protokol
- d. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub. Bagian Anggaran
 - b) Sub. Bagian Verifikasi
- e. Bagian Perundang-undangan dan Humas terdiri dari :
 - a) Sub. Bagian Perundang-undangan
 - b) Sub. Bagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 31 orang

pegawai dengan jenjang pendidikan tertinggi S2 dan terendah SD.

Secara terperinci, jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel JENJANG PENDIDIKAN SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGETAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	2 orang
2.	Sarjana (S1)	18 orang
3.	Ahli Madya (D3)	1 orang
4.	SMA	8 orang
5.	SLTP	-
6.	SD	2 orang
Jumlah		31 orang

Adapun susunan struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan d
 - 2.1.3. Sasaran
 - 2.1.4. Strategi
 - 2.1.5. kebijakan
- 2.2. Rencana Kerja Tahunan 2019
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2018-2023
- Lampiran 2. Matriks Rencana Kerja Tahun 2019
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam upaya mengimplementasikan rencana strategis tersebut dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Magetan, yaitu :

“Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan lebih sejahtera”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, Sekretariat DPRD merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Misi Kepala Daerah yang ke 5 (lima) yaitu :

“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil”.

2.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan. Tujuan di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah :

“Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah”.

2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah:

“Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD”.

2.1.4 Strategi

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan menentukan strategi sebagai berikut :

“Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka fasilitasi fungsi DPRD”.

2.1.5 Kebijakan

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Sekretariat DPRD kabupaten Magetan menentukan kebijakan sebagai berikut :

“Fasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD”.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU

Visi : Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan lebih sejahtera			
Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka fasilitasi fungsi DPRD	Fasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah sarana yang dihasilkan}}{\text{Jumlah sarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2019

Rencana Kerja Tahunan merupakan perencanaan satu tahun dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra. Berikut indikator dan target kinerja sasaran pada tahun 2019.

Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGETAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD	Persentase Kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%

Pencapaian sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD	Program Pelayanan Perundang – Undangan dan Kehumasan DPRD	Pembahasan Rancangan Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD
		Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD

	Program Kerjasama dengan Mas Media	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama
		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
		Rapat –rapat paripurna
		Kegiatan Reses
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perwujudan dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MAGETAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD	Persentase Kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan pada tahun 2019 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan. Capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2019, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut:

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2019)	Realisasi (2019)	Capaian (%)
Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

➤ **Tujuan : Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah.**

Tujuan Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi.

Tujuan	Sasaran	IKU
Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target (2019)	Realisasi (2019)	Capaian (%)	Kategori
Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 100% (sangat berhasil).

Realisasi dari tahun 2017-2019 indikator kinerja pada sasaran meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%	100 %	100 %	100%

Berdasarkan table diatas perbandingan realisasi kinerja dari sasaran “meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD” dan indikator kinerja “persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi” dengan target 100% yaitu realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mempunyai konsistensi realisasi kinerja yaitu 100%.

Capaian kinerja dari indikator persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi pada tahun 2019 adalah 100%. Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perundang-undangan dan Kehumasan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD
 - Bimbingan Teknis Perundang-undangan Anggota DPRD
2. Program Kerjasama dengan Mas Media dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
 - Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 - Rapat-rapat paripurna
 - Kegiatan Reses
 - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah :

1. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD dan OPD di Kabupaten Magetan untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Sedangkan hambatan/ permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis adalah :

1. Pembahasan dan rapat-rapat tidak terlaksana tepat waktu, sehingga harus menjadwalkan kembali kegiatan yang belum terlaksana.
2. Raperda yang telah direncanakan dalam prolegda sebagian besar dibahas pada akhir triwulan sehingga menyebabkan padatnya agenda kegiatan yang harus diselesaikan pada akhir tahun.
3. Jadwal kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan hasil rapat badan musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Adanya kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program-program yang lain.

Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD untuk memperhatikan/ konsisten dalam mentaati jadwal rencana kegiatan yang telah tersusun.
2. Koordinasi internal dan eksternal ditingkatkan. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran/ Program	Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	30.742.923.821	25.214.141.775	82,02
1. Program Pelayanan Perundang-Undangan dan Kehumasan DPRD	14.512.923.821	11.013.756.509	75,89
a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD	11.317.923.821	9.099.310.056	80,40
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD	3.195.000.000	1.914.446.453	59,92
2. Program Kerjasama dengan Mas Media	501.000.000	445.900.000	89,00
a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	501.000.000	445.900.000	89,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.729.000.000	13.754.485.266	87,45
a. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	77.250.000	27.038.900	35,00
b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	13.750.950.000	12.263.003.840	89,18
c. Rapat-rapat paripurna	660.800.000	348.719.126	52,77
d. Kegiatan Reses	1.170.000.000	1.104.635.500	94,41
e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	70.000.000	11.087.900	15,84

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis dari Sekretariat DPRD adalah meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD dan Indikator Kinerja Utama dari Sekretariat DPRD adalah Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 30.742.923.821 dengan persentase anggaran sebesar 82,0%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan pada Tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bagian dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan pada Tahun 2019 diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Baik**. Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 berdasarkan sasaran strategis meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD dengan capaian kinerja 100% dan penyerapan anggaran 82,02%. Hal ini menginterpretasikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan berdasarkan sasaran tersebut berpredikat **sangat baik**.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan sebagai berikut :

- a. Jadwal kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan hasil rapat badan musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal

- b. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program-program yang lain

4.2. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD untuk memperhatikan/ konsisten dalam mentaati jadwal rencana kegiatan yang telah tersusun.
2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentiil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Magetan.

Magetan, Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGETAN

SUJONI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 198302 1 032

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatkan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah	meningkatnya fasilitasi kegiatan DPRD	1.1.1	Program Pelayanan Perundang - Undangan dan Kehumasan DPRD	persentase rancangan peraturan yang selesai dibahas %		100	11.082.450.000	100	12.150.000.000	100	12.500.000.000	100	12.850.000.000	100	12.900.000.000	100	61.482.450.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.1.1	Pembahasan Rancangan Perundang - undangan dan Kehumasan DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas dan disahkan menjadi Perda Raperda		15	7.887.450.000	15	8.650.000.000	15	8.900.000.000	15	9.250.000.000	15	9.300.000.000	75	43.987.450.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.1.2	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undangan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan bimtek anggota dewan yang dilaksanakan kali	4	6	3.195.000.000	6	3.500.000.000	6	3.600.000.000	6	3.600.000.000	6	3.600.000.000	30	17.495.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.2	Program Kerjasama dengan Mas Media	persentase kegiatan DPRD yang diinformasikan melalui media masa %		100	486.000.000	100	535.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	2.721.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.2.1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah informasi yang di ekspos media cetak dan elektronik kali		100	486.000.000	100	535.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	500	2.721.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.3	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	persentase kegiatan hearing, rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna dan reses yang difasilitasi %	100	100	9.956.250.006	100	12.249.550.000	100	12.006.697.000	100	11.965.000.000	100	11.975.000.000	100	58.152.497.006	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.3.1	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah kegiatan RDP yang dilaksanakan kali	200	60	77.250.000	60	80.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	100.000.000	300	437.250.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

		1.1.3.2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan kali	205	135	7.659.000.000	135	9.400.000.000	135	9.541.697.000	135	9.500.000.000	135	9.500.000.000	675	45.600.697.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.3.3	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan kali	75	70	400.000.006	70	525.000.000	70	550.000.000	70	550.000.000	70	550.000.000	350	2.575.000.006	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.3.4	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan kali	3	3	1.750.000.000	3	2.174.550.000	3	1.750.000.000	3	1.750.000.000	3	1.750.000.000	15	9.174.550.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.3.5	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan kali	3	40	70.000.000	40	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	200	365.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Tersedianya administrasi sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan yang memadai	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Angka		12	2.006.086.500	12	1.945.425.000	12	2.000.425.000	12	2.055.425.000	12	2.110.425.000	12	10.117.786.500	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM Dokumen		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	5	175.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		1.1.1.2	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Bulan		12	1.981.086.500	12	1.915.425.000	12	1.965.425.000	12	2.015.425.000	12	2.065.425.000	60	9.942.786.500	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %		100	4.153.925.000	100	3.355.425.000	100	1.360.000.000	100	1.245.000.000	100	1.275.000.000	100	11.389.350.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Unit	46	34	463.500.000	34	500.000.000	34	500.000.000	34	515.000.000	34	525.000.000	170	2.503.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		2.1.2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Unit		7	500.000.000	4	450.000.000	4	350.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	24	1.700.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

		2.1.2.3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor Bulan		12	205.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	275.000.000	60	1.240.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		2.1.2.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor Unit		1	200.000.000	1	210.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	275.000.000	5	1.215.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		2.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Unit		2	920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	920.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		2.1.2.6	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan Unit		2	1.865.425.000	2	1.945.425.000	0	0	0	0	0	0	4	3.810.850.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		3.1.3	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD	persentase perencanaan dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan DPRD yang disusun %		100	355.000.000	100	385.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	395.000.000	100	1.915.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		3.1.3.1	Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi keuangan DPRD	Jumlah verifikasi dan evaluasi dokumen administrasi keuangan DPRD Dokumen		1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	5	65.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		3.1.3.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Tahun		1	350.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	5	1.850.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi %		100	95.000.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	555.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.1.4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek orang		6	95.000.000	6	100.000.000	6	115.000.000	6	120.000.000		125.000.000	30	555.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		5.1.5	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %		100	5.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	70.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		5.1.5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja yang disusun Dokumen		10	5.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	17.500.000		17.500.000	50	70.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

		6.1.6	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur dan anggota DPRD yang mendapatkan pakaian dinas %		100	755.425.000	100	455.500.000	100	455.500.000	100	465.500.000	100	465.500.000	100	2.597.425.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		6.1.6.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Paket		6	755.425.000	6	455.500.000	6	455.500.000	6	465.500.000		465.500.000	26	2.597.425.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Total						28.895.136.506		31.190.900.000		29.392.622.000		29.658.425.000		29.863.425.000		149.000.508.506		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

Rancangan P-RKPD Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		K ET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	Fungsi Penunjang Urusan						26.393.000.000,00	36.264.660.321,00	9.871.660.321,00		0,00	
	4.01	Administrasi Pemerintahan [4010401] SEKRETARIAT DPRD						26.393.000.000,00	36.264.660.321,00	9.871.660.321,00		0,00	
	4.01.040 1	SEKRETARIAT DPRD						26.393.000.000,00	36.264.660.321,00	9.871.660.321,00		0,00	
	4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	75 skor	75 skor			2.006.086.500,00	2.006.086.500,00	0,00		0,00	
1	4.01.01.0 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	1.981.086.500,00	1.981.086.500,00	0,00	0 bulan	0,00	
2	4.01.01.0 23	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		K ET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %			1.368.500.000,00	1.848.500.000,00	480.000.000,00		0,00	
3	4.01.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	0 unit	2 unit	Kabupaten	Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0 unit	0,00	
4	4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	34 unit	34 unit	Kabupaten	Kabupaten	463.500.000,00	463.500.000,00	0,00	34 unit	500.000.000,00	
5	4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	7 jenis	9 jenis	Kabupaten	Kabupaten	500.000.000,00	980.000.000,00	480.000.000,00	4 jenis	450.000.000,00	
6	4.01.02.050	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	12 bulan	250.000.000,00	
7	4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung dan pagar halaman kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	Kabupaten	Kabupaten	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1 unit	210.000.000,00	
	4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur dan anggota DPRD yang mendapatkan pakaian dinas	- %	100 %			657.150.000,00	627.150.000,00	-30.000.000,00		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		K ET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.01.03.0 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6 jenis	6 jenis	Kabupaten	Kabupaten	657.150.000,00	627.150.000,00	-30.000.000,00	6 jenis	455.500.000,00	
	4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	- %	100 %			95.000.000,00	95.000.000,00	0,00		0,00	
9	4.01.05.0 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	10 orang	10 orang	Kabupaten	Kabupaten	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	6 orang	100.000.000,00	
	4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %			5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	
10	4.01.07.0 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10 dokumen	15.000.000,00	
	4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan hearing, rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna dan reses yang	- %	100 %			10.337.813.500,00	15.729.000.000,00	5.391.186.500,00		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		K ET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			difasilitasi										
11	4.01.15.0 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah RDP yang dilaksanakan	55 kali	60 kali	Kabupaten	Kabupaten	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	60 kali	80.000.000,00	
12	4.01.15.0 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	135 kali	135 kali	Kabupaten	Kabupaten	7.840.563.500,00	13.750.950.000,00	5.910.386.500,00	135 kali	9.400.000.000,00	
13	4.01.15.0 04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	70 kali	70 kali	Kabupaten	Kabupaten	600.000.000,00	660.800.000,00	60.800.000,00	70 kali	525.000.000,00	
14	4.01.15.0 05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 kali	2 kali	Kabupaten	Kabupaten	1.750.000.000,00	1.170.000.000,00	-580.000.000,00	3 kali	3.174.550.000,00	
15	4.01.15.0 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan	40 kali	40 kali	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	40 kali	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		K ET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.32	Program Kerjasama dengan Mas Media	Persentase kegiatan DPRD yang diinformasikan melalui media massa	- %	100 %			486.000.000,00	501.000.000,00	15.000.000,00		0,00	
16	4.01.32.001	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi yang diekspos media baik cetak maupun elektronik	100 kali	100 kali	Kabupaten	Kabupaten	486.000.000,00	501.000.000,00	15.000.000,00	100 kali	535.000.000,00	
	4.01.71	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase perencanaan dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan DPRD yang disusun	- %	100 %			355.000.000,00	935.000.000,00	580.000.000,00		0,00	
17	4.01.71.001	Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi keuangan DPRD	Jumlah verifikasi dan evaluasi dokumen administrasi keuangan DPRD	1 tahun	1 tahun	Kabupaten	Kabupaten	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1 tahun	10.000.000,00	
18	4.01.71.002	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	35 kali	35 kali	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000,00	930.000.000,00	580.000.000,00	1 kali	375.000.000,00	
	4.01.72	Program Pelayanan Perundang - Undangan dan Humas DPRD	Persentase raperda yang selesai dibahas	- %	100 %			11.082.450.000,00	14.512.923.821,00	3.430.473.821,00		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		K ET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	4.01.72.0 01	Pembahasan Rancangan Perundang - undangan dan Kehumasan DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas dan disahkan menjadi Perda Kabupaten Magetan	15 Raperda	15 Raperda	Kabupaten	Kabupaten	7.887.450.000,00	11.317.923.821,00	3.430.473.821,00	15 Raperda	8.650.000.000,00	
20	4.01.72.0 02	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undangan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan Bimtek Anggota Dewan Yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	Kabupaten	Kabupaten	3.195.000.000,00	3.195.000.000,00	0,00	6 kali	3.500.000.000,00	
TOTAL								26.393.000.000,00	36.264.660.321,00	9.871.660.321,00		28.330.050.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Magetan Kode pos : 63318
Nomor Telp. (0351) 895280 Fax : 896401E-mail : setwan@magetankab.go.id

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WINARTO, S.Sn, MM
Jabatan : SEKRETARIS DPRD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.Drs. H. SUPRAWOTO, SH. M.Si.
Jabatan : BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2020



Dr. Drs.H. SUPRAWOTO. SH. M.Si

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGETAN

WINARTO, S.Sn, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651213 199403 1 006

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan DPRD	Persentase Kegiatan DPRD yang difasilitasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.840.425.000	
	<i>Kegiatan</i>		
	1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.815.425.000	PAD
	2 Survey Kepuasan Masyarakat	25.000.000	PAD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.061.000.000	
	<i>Kegiatan</i>		
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000.000	PAD
	2 Pengadaan Perlengkapan Kantor	156.000.000	PAD
	3 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	205.000.000	PAD
	4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000	PAD
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	363.500.000	
	<i>Kegiatan</i>		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	363.500.000	PAD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.000.000	
	<i>Kegiatan</i>		
	1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95.000.000	PAD
5	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000	
	<i>Kegiatan</i>		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	PAD
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.265.563.500	
	<i>Kegiatan</i>		
	1 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama	80.000.000	PAD
	2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7.840.563.500	PAD
	3 Rapat –rapat paripurna	525.000.000	PAD
	4 Kegiatan Reses	1.750.000.000	PAD
	5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	70.000.000	PAD

7	Program Kerjasama dengan Mas Media		500.000.000	
	Kegiatan			
	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	500.000.000	PAD
8	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD		385.000.000	
	Kegiatan			
	1	Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi Keuangan DPRD	10.000.000	PAD
	2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	375.000.000	PAD
9	Program Pelayanan Perundang – Undangan dan Kehumasan DPRD		12.244.350.000	
	Kegiatan			
	1	Pembahasan Rancangan Perundang-undangan dan Kehumasan DPRD	9.049.350.000	PAD
	2	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD	3.195.000.000	PAD
	TOTAL		26.769.838.500	



Dr. Drs.H. SUPRAWOTO. SH. M.Si

Magetan, Januari 2020



WINARTO, S.Sn, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651213 199403 1 006

